

**PENGINTEGRASIAN USAHA NORMALISASI DAN INTERVENSI SOSIAL
(PUNDI SOSIAL) UNTUK BAIK KEMANDIRIAN SOSIAL DI KABUPATEN
SUMBAWA BARAT**



PUNDI SOSIAL

Pengintegrasian Usaha Normalisasi dan Intervensi Sosial

TIM PENYUSUN

YUYUN YUNIARSIH, S.AG

ROCHIMIN, S.K.M

BURHAN DAENG MANGAGO, S.Pi, M.Si

LATAR BELAKANG

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada priode ke 2 Bupati dan wakil bupati Terpilih (2021-2026) menetapkan VISI “Terwujudnya KSB Baik berlandaskan gotong royong”, dan misi ke 2 **KSB baik dalam kemandirian sosial masyarakat**; Visi Misi itu akan dijalankan dalam sepuluh agenda kebijakan prioritas diantaranya yaitu penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan public terpadu dan terintegrasi

Untuk menuju KSB Baik dalam Kemandirian Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat melaksanakan **Pengintegrasian Usaha Normalisasi Dan Intervensi Sosial** atau disebut juga **PUNDI SOSIAL**.

PERMASALAHAN

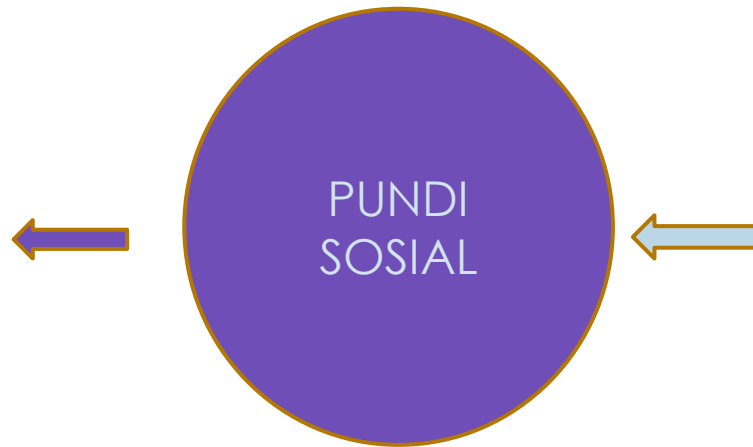
Pemasalahan dalam usaha mewujudkan misi baik dalam kemandirian sosial masyarakat sebagai berikut:

- ▶ 1. Cara ukur peningkatan kemandirian sosial masyarakat belum ditentukan
- ▶ 2. Kegiatan pengumpulan uang dan barang (PUB) dan penyalurannya tidak terekam dan terkoodinir
- ▶ 3. Rendahnya motivasi masyarakat perorangan atau kelompok, lembaga, dunia usaha dan potensi sumberdaya kesejahteraan sosial (PSKS) lainnya dalam berpartisipasi mengurangi atau menyelesaikan kebutuhan pelayanan terhadap pemerlu pelayanan sosial (PPKS) yang muncul atau yang sudah ada di tengah tengah masyarakat kabupaten sumbawa barat.
- ▶ Dinas Sosial Selama ini kurang responsif terhadap PPKS baru hasil dari laporan masyarakat, pekerja social ataupun dari media social karena tidak terdapat dalam anggaran Dinas Sosial yang ditujukan untuk penanganan PPKS tersebut.

MASALAH

**PEMERLU PELAYANAN
KESEJAHTERAAN
SOSIAL (SOCIAL
PROBLEM)**

- 1. MASALAH SOSIAL
KONVENSIONAL**
- 2. MASALAH SOSIAL
KONTEMPORER**



SOLUSI

**POTENSI SUMBER
KESEJAHTERAAN SOSIAL (SOCIAL
WORK)**

- 1. PSM**
- 2. TKSK**
- 3. TAGANA**
- 4. PELOPOR**
- 5. FASILITATOR**
- 6. LKS**
- 7. WKSBM**
- 8. DUNIA USAHA**
- 9. KARANG TARUNA**
- 10. (TIM RESPON CEPAT)**



LANDASAN DAN DASAR HUKUM

- ▶ Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
- ▶ 2. Undang –Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- ▶ 3. Undang – Undang nomor 09 tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang;
- ▶ 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan social;
- ▶ 5. Peraturan Menteri Sosial nomor 22 tahun 2017 tentang restorasi social
- ▶ 6. Peraturan menteri Sosial nomor 184 tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
- ▶ 7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 42 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM);
- ▶ 8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 2021 tentang Penyelenggraan Pengumpulan Uang dan Barang.
- ▶ 9. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 007 Tahun 2021 tentang pembentukan Tim Respon Cepat di Kabupaten Sumbawa Barat;

MAKSUD DAN TUJUAN

- ▶ Mengukur tingkat kemandirian sosial masyarakat dengan membandingkan (rasio) besaran akumulasi uang dan barang yang bersumber dari dana pemerintah daerah dengan akumulasi pengumpulan uang dan barang dari masyarakat perorangan atau kelompok, lembaga, dunia usaha dan PSKS lainnya dalam kurun waktu 1 tahun.
- ▶ 2. Merekam dan mengkoordinir PUB serta pengawasan peyalurannya.
- ▶ 3. Menjadikan Pundi Sosial sebagai alat, sarana dan ikon melakukan pemicuan untuk membangun rasa kepedulian dan kesetiakawanan sosial
- ▶ 4. Membentuk jejaring yang menghubungkan masyarakat perorangan atau kelompok, lembaga, dunia usaha dan PSKS lainnya dengan PPKS yang muncul atau yang sdh ada baik secara langsung ataupun tidak langsung.

RENCANA PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

- ▶ 1. Penerapan inovasi dilaksanakan pada awal tahun 2020 ketika bencana non alam covid-19 terdampak di Kabupaten Sumbawa Barat sehingga muncul masalah kesejahteraan social baru di tengah masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang diketahui belum mendapatkan masyarakat yang belum mendapatkan jaminan dan perlindungan social.
- ▶ 2. Pelaksanaan kegiatan pundi social selama kurang dari 2 tahun sudah mendapatkan respon positif dari masyarakat karena pelaksanaan pengumpulan Pundi dari masyarakat untuk masyarakat yang di koordinatori oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti WKSBM, LKS dan potensi sumber perorangan lainnya.
- ▶ 3. Melaksanakan sosialisasi Pengumpulan Uang atau Barang untuk lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) serta Sosilaisasi Kesetiakawanan untuk Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)

Langkah langkah pelaksanaan PUNDI SOSIAL :

- Melakukan sosialisasi dan pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk melaksanakan pengumpulan uang atau barang serta sumbangan dari Masyarakat
- PSKS Melakukan Pengumpulan pencatatan dan pelaporan terhadap hasil dari pengumpulan pundi
- PSKS Menyalurkan bantuan sesuai dengan kebutuhan hasil dari careseeking di wilayah PSKS berada dan atau dengan arahan tim respon cepat dengan tehnik sebagai berikut:
 - a) PSKS dan Masyarakat mengidentifikasi dan careseeking terhadap Pemerlu Pelayanan.
 - b) Membuat laporan ke Dinas Sosial bila menemukan permasalahan dan kebutuhan Pemerlu Pelayanan.
 - c) Team respon cepat membuat kajian tentang kebutuhan yang dibutuhkan oleh sasaran atau Pemerlu Pelayanan.
 - d) Team Respon Cepat mengarahkan PSKS untuk menyalurkan bantuan kepada sasasaran atau Pemerlu Pelayanan
 - e) PSKS Menyiapkan Laporan dan Dokumentasi

Kegiatan pundi sosial melibatkan beberapa komponen atau stakeholder yaitu:

- ▶ WKSBM yang sudah ada di setiap Desa/Kelurahan di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat
- ▶ Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang sudah ada di beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
- ▶ Serta PSKS lainnya dibawah Binaan Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat.

System yang digunakan dalam layanan informasi sebagai berikut:

- ▶ Informasi langsung melalui pembinaan dan sosialisasai
- ▶ Membuat group diskusi PSKS melalui Whats up
- ▶ Informasi Kegiatan PSKS melalui media social (FB)
- ▶ Tersedia leaflet dan juknis pelaksanaan kegiatan WKSBM,LKS dan kegiatan Pengumpulan Uang atau Barang
- ▶ Sampai saat ini masih layanan secara manual dan kedepan menggunakan Aplikasi online dan real time

Kegiatan pundi sosial mempunyai dampak yang positif terhadap sasaran penerima bantuan/manfaat antara lain :

- ▶ Tercukupinya kebutuhan barang dan sembakau yang diperlukan oleh pemerlu pelayanan.
- ▶ Menyelesaikan permasalahan kesejahteraan sosial di masyarakat dengan cepat
- ▶ Meningkatnya kemandirian sosial masyarakat.

Masalah dan kendala:

- ▶ Sulitnya memberikan kesadaran kepada beberapa masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan pundi social hal ini dapat diatasi dengan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan sector terkait dalam masyarakat.
- ▶ Sedikitnya dukungan anggaran dari OPD melalui APBD maupun APBN untuk Pemerlu Pelayanan baru namun dapat dilaksanakan dengan memberdayakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di tengah masyarakat.
- ▶ Belum tersediannya Aplikasi pendukung

INDIKATOR KEBERHASILAN

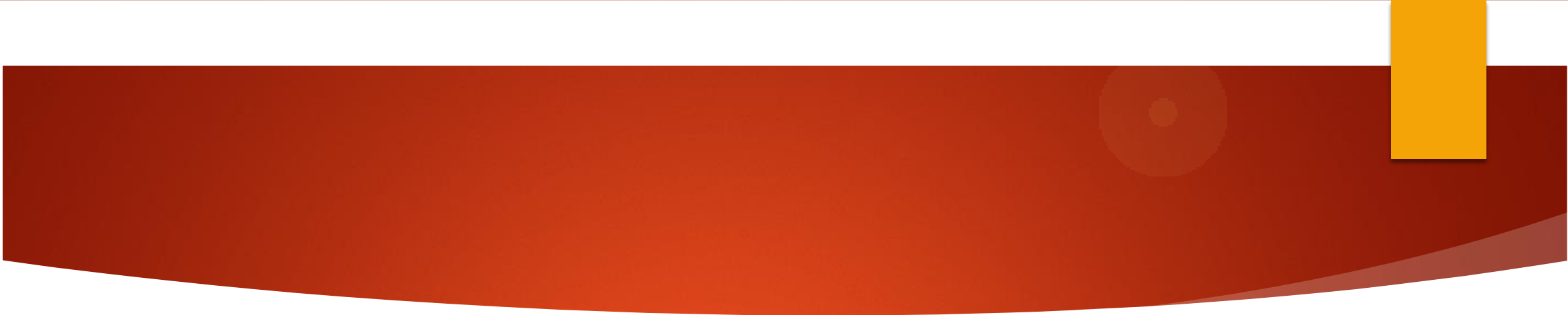
- ▶ Banyaknya rekomendasi ijin PUB yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial (target th. 2021 sebanyak 10 rekomendasi ijin).
- ▶ Perekaman penyaluran PUB, Donasi dan bantuan sosial non pemerintah secara berkala dalam 1 tahun
- ▶ Adanya Jejaring antara PSKS sehingga menghubungkan kelompok pemberi (PSKS) dengan kelompok penerima (PPKS) secara langsung ataupun tidak langsung.
- ▶ Meningkatkan kegiatan pemicuan dengan Sosialisasi, Promosi, Leaflet, brosur dan kegiatan lainnya untuk memperbesar intervensi kepada PPKS di luar intervensi pemerintah daerah.

UKURAN KEPUASAN

- ▶ Masyarakat terbantuan dengan kehadiran pundi social
- ▶ Terbentuknya kelompok PSKS baru dalam pengumpulan pundi social
- ▶ Meningkatnya kemandirian social masyarakat
- ▶ Berkurangnya masalah kesejahteraan social
- ▶ Pundi social dapat membantu dan meringankan beberapa permasalahan social terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok para pemerlu pelayanan
- ▶ meningkatnya intervensi masyarakat perorangan/kelompok, lembaga, dunia usaha dan menurunnya intervensi pemerintah dalam pengananan PPKS baik dalam bentuk intervensi anggaran atau program/kegiatan sosial lainnya

Pelajaran yang bisa dipetik dari kegiatan Pundi Sosial

- ▶ **Membangun rasa kesetiakawanan,**
- ▶ **Meningkatkan kepekaan dan kepedulian antara masyarakat dengan masyarakat,**
- ▶ **Meningkatkan peran aktif masyarakat dibidang kesejahteraan social,**
- ▶ **Meningkatnya ketahanan masyarakat**
- ▶ **dan yang lebih penting daripada itu adalah terbentuknya kemandirian sosial masyarakat tanpa harus bergantung lagi kepada pemerintah.**



Sekian dan terima kasih